

**PERAN LSPPA DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN WARGA  
TERDAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA YOGYAKARTA  
INTERNASIONAL AIRPORT (YIA)**



**UIN**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Oleh  
**Ahmad Taufiqur Rohman**  
1720010123

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Master Of Art (M.A)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (Iis)  
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (Ipkp)

YOGYAKARTA  
2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauziqur Rohman

NIM : 17200010123

Jenjang : Magister (S2)

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ahmad Fauziqur Rohman S.Sos.

NIM:17200010123

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Taufiqur Rohman

NIM : 17200010123

Jenjang : Magister (S2)

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAJENGA  
YOGYAKARTA



Ahmad Taufiqur Rohman S.Sos.  
NIM:17200010123



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-549/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERAN LSPPA DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN WARGA TERDAMPAK  
PEMBANGUNAN BANDARA YOGYAKARTA INTERNASIONAL AIRPORT (YIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD TAUFIQUR ROHMAN, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010123  
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

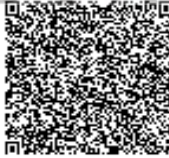
dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

 Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
SIGNED  
Valid ID: 600a831c2b182

 Penguji II  
Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.  
SIGNED  
Valid ID: 600a8194c1e22

 Penguji III  
Ro'fah, M.A., Ph.D.  
SIGNED  
Valid ID: 6007e46be473

 Yogyakarta, 24 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.  
SIGNED  
Valid ID: 600a8b63713fe

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

**Direktur Pascasarjana**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERAN LSPPA DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN WARGA  
TERDAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA YOGYAKARTA  
INTERNASIONAL AIRPORT (YIA)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Taufiqur Rohman

NIM : 17200010123

Jenjang : Magister (S2)

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

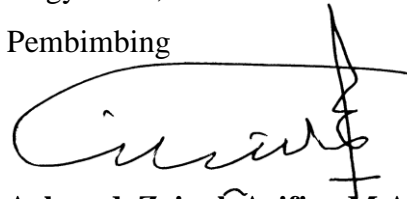
Konsentrasi: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Art (M.A)*

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Pembimbing



**Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.**

NIP, : 19751118 200801 1 013

MOTTO

**HIDUP MULIAH ATAU MATI SYAHID**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Sujud dan Sembah saya haturkan kepada Allah yang senantiasa memberikan kesempatan hambah untuk mrlanjutkan studi hingga S2

Penulis Persembahkan Tulisan ini kepada:

Ibu tercinta yang senantiasa selalu memberi Support, Mendidik dari sejak masih dalam kandungan hingga saat ini.

Bapak seorang tauladan yang selalu bijaksana dalam membeikan pendidikan, arahan maupun keputusan kepada putra putrinya.

Isteri tersayang yang senantiasa setia mendampingi, melengkapi, memberi semangat serta pengalaman hingga menjadi seorang Ayah.

Tak lupa kepada Adikku Khoirotun Nisa' yang senantiasa mendoakan dari jauh melalui perjalanan menuntut Ilmu di Pesantren

Kemudian Secara umum kepada seluruh keluarga besarku

Kepada UIN Sunan Kalijaga khususnya konsentrasi IPKP



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Peran Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) dalam Pendampingan Perempuan Warga Terdampak Pembangunan Bandara YIA merupakan sebuah wujud dari kontribusi LSPPA sebagai LSM yang mempunyai fokus memperjuangkan hak perempuan dan anak yang berarti menegakkan kesetaraan gender. Pada konteks warga terdampak LSPPA masuk sebagai wujud dari kontribusi program pemberdayaan perempuan dengan harapan dapat mengatasi ataupun meminimalisir dampak negatif dari adanya pembangunan infrastruktur bandara. Tesis ini menarik karena ditengah kegelisahan warga terdampak pembangunan bandara LSPPA mencoba masuk dengan memberikan salah satu solusi alternatif perempuan warga terdampak agar dapat berkembang mengikuti arus pembangunan dengan artian tidak tertinggal.

Tulisan ini menggunakan data hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan kurang lebih delapan bulan mulai dari (Maret-Oktober 2020) serta pengamatan-pengamatan pra penelitian dengan observasi secara langsung saat proses pembebasan lahan tahun 2017. Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu LSPPA serta kelompok perempuan warga terdampak pembangunan bandara. Untuk mendapatkan data yang valid, pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria orang yang paling mengetahui sumber data yang akan digali dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dekomendasi.

Hasil temuan dari Tesis ini menunjukkan dampak dari adanya kebijakan pembangunan bandara memberikan ruang bagi LSM sebagai lembaga non-Negara dalam mendelegasikan program pemberdayaan. Hasil analisis LSPPA beserta kelompok penerima program terdapat dampak-dampak yang dikhawatirkan akan terjadi dimasa yang akan datang, diantaranya warga tidak dapat mengatur uang ganti rugi yang diterima hingga munculnya tempat prostitusi yang menjadi tantangan moral bagi warga. Adanya dampak tersebut menjadi dasar dilaksanakannya program pemberdayaan oleh LSPPA. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga jenis pemberdayaan yaitu secara kritis, praktis dan bantuan modal usaha. Pemberdayaan secara kritis yaitu dengan pemberian materi, sedangkan secara praktis dilakukan dengan pemberian pelatihan keterampilan membuat kerajinan dan pengelolaan makanan. Kemudian yang terakhir bantuan modal diberikan dengan model pengelolaan koperasi diharapkan dapat membantu kelompok dalam mengembangkan usahanya. Secara garis besar, ketiga program tersebut dipandang berhasil dalam mendorong partisipasi dan kontrol perempuan dalam keluarga atau mewujudkan kesetaraan gender untuk kesejahteraan.



Kata Kunci: Dampak Pembangunan Bandara, Pemberdayaan perempuan, Kesetaraan Gender, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Peran LSPPA dalam Pendampingan Perempuan Warga Terdampak Pembangunan Bandara YIA*”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga yaitu, bapak prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Prof. noorhaidi hasan., MA., M.Phil., Ph.D., selaku direktur pascasarjana, Dr. Nina Mariani Noor, M.A. dan Najib Kailani, S.Fil.1, MA., Ph.D. Sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Interdisciplinary Islamic Studies. Terimakasih kepada seluruh dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada Bapak Achmad Zainal Arifin, M.A.,Ph.D selaku pembimbing yang sabar memberikan arahan serta gagasan-gagasan penting yang disampaikan dalam kepenulisan dan penyusunan disetiap bab. Atas bimbingan Beliau Tesis ini dapat diselesaikan dengan tuntas. Kepedulian Beliau terhadap kepenulisan ini sangat memberi solusi mulai dari pemilihan tema yang dibahas, lokasi penelitian hingga pada tataran penyusunan konsep pembahasan.

Selain itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada keluarga Ibu/Bapak, Istri, Adik, Anakku tercinta dan seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, mereka tidak henti-hentinya mendoakan dan mendukung kesuksesan penulis terutama dalam menyelesaikan tugas akhir Tesis ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman konsentrasi IPKP atas kebersamaan, pengalaman, sharing keilmuan dan lain sebagainya. Terimakasih saya sampaikan kepada pihak LSPPA, Bapak Agus dan Ibu Dwi yang sangat welcome mendukung, memberi saran, membantu penulis dalam mencari data penelitian. Kemudian teman-teman ojol Grab/Gojek yang senantiasa menemani rutinitas keseharian serta dukungannya dalam menyelesaikan tulisan ini.

Yogyakarta,

Ahmad Taufiqur Rohman



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	2
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	5
MOTTO .....	6
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	7
ABSTRAK .....	8
KATA PENGANTAR .....	10
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR GAMBAR .....	14
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>15</b>
A. Latar Belakang .....	15
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan & Kegunaan .....	22
D. Kajian Pustaka.....	22
E. Kerangka Teoritis.....	30
F. Metode Penelitian.....	43
G. Sistematika Pembahasan .....	50
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM LEMBAGA STUDI PENGEMBANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BESERTA KELOMPOK DAMPINGAN.....</b>	<b>52</b>
A. LSM Sebagai Civil Society dan Partisipasinya dalam Pembangunan di Indonesia .....	53
B. Gambaran Tentang LSPPA .....	56
C. Gambaran Umum Kelompok Penerima Program .....	60
D. Kepengurusan Kelompok.....	62
E. Gambaran Program Pemberdayaan.....	64
F. Tujuan Program Pemberdayaan .....	67
<b>BAB III: KONDISI SOSIAL EKONOMI WARGA TERDAMPAK DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN.....</b>	<b>70</b>
A. Dampak Pembangunan Bandara Secara Umum bagi Warga.....	74
B. Dampak Pembangunan Bandara Bagi Perempuan.....	84
C. Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan.....	91
D. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	116
E. Rencana Keberlanjutan Program Pemberdayaan .....	118
<b>BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA YIA .....</b>	<b>120</b>
A. Keterkaitan Dampak dengan Pemberdayaan Perempuan .....	121
B. Mendorong Partisipasi Perempuan melalui Pemberdayaan .....	127
C. Ciri dan Peran LSPPA dalam Melakukan Pemberdayaan Perempuan	130

D. Pengaruh Aspek Keberhasilan LSPPA dalam Melakukan Program Pemberdayaan .....	133
BAB V: PENUTUP .....	138
A. Kesimpulan .....	138
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA .....	143





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kepengurusan Kelompok Penerima Program pemberdayaan.....	63
Gambar 2 Program berdasarkan Karakter Model Pelaksanaannya.....	66
Gambar 3 Dampak pembangunan Bandara yang dirasakan kelompok .....	76
Gambar 4 Dampak sosial jangka panjang yang di khawatirkan .....	84
Gambar 5 Dampak bagi Perempuan .....	90
Gambar 6 Jumlah Perempuan di Sektor Pertanian.....	90
Gambar 7 Peran Pendamping dalam Program Pemberdayaan.....	100
Gambar 8 Sirkulasi Pembangunan di Lingkungan Bandara YIA .....	121
Gambar 9 Hubungan Permasalahan Budaya, Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender .....	128

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tulisan ini fokus membahas tentang peranan Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendampingi warga terdampak pembangunan bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA). Mendampingi yang dimaksud yaitu memberikan pelatihan baik berupa pendidikan kritis maupun secara praktik dengan memberikan materi maupun pelatihan berupa pembuatan makanan atau keterampilan. Pendampingan ini diberikan terutama pada kelompok rentan yaitu perempuan yang terdampak pembangunan bandara tersebut. Secara spesifik, maksud dari adanya pendampingan yaitu agar perempuan warga sekitar bandara atau warga yang terdampak pembangunan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan ikut serta menikmati perkembangan daerah sekitar bandara sehingga diharapkan dapat ikut berpartisipasi meramaikan pasar perdagangan.

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa tema dalam tulisan ini mencakup 3 aspek penting: pertama tentang pemberdayaan perempuan; kedua tentang dampak pembangunan infrastruktur; dan ketiga tentang kontribusi LSM dalam pembangunan. Terkait aspek pemberdayaan, dapat merujuk pada studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat atau biasa dikenal sebagai istilah *community development* dalam tulisan akademik merupakan jawaban alternatif dari sebuah krisis yang

diakibatkan karena praktik pembangunan yang terlalu mengedepankan peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa mengantisipasi dampak buruk dari adanya eksploitasi berlebihan. Lebih detailnya pemberdayaan merupakan pembangunan yang bersifat *bottom-up*, bergerak dari bawah dan digerakkan secara komunitarian yang berkerjasama, gotong-royong mengembangkan budaya, lingkungan, personal dan spiritual. Selain itu, terdapat beberapa prinsip yang ditanamkan dalam praktik pengembangan masyarakat yaitu antara lain prinsip ekologi, prinsip keadilan sosial dan HAM, prinsip menghargai yang lokal, prinsip proses, dan yang terakhir prinsip global dan lokal. Prinsip-prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai pondasi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan pemberdayaan perempuan, karena sasaran program pemberdayaannya yaitu perempuan maka konsep gender menjadi hal penting sebagai tolak ukur, alasan dalam melakukan pemberdayaan. Dalam sejarah perkembangan kaum feminis mengembangkan konsep gender pada tahun 1970 yang diawali oleh kesadaran bahwa nasib kaum perempuan tidak sebaik kaum laki-laki.<sup>2</sup> Pada tahun 1977 di London konsep kesetaraan gender diusung oleh gerakan feminis sebagai *mainstream* gerakan mereka yang membedakan definisi gender dan sex, disebutkan bahwa gender merupakan

---

<sup>1</sup> Jim ife & Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Terj. Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

<sup>2</sup> Sheila Rowbotham, *Women in Movement: Feminism and Social Action* (New York: Rountledge, 1992), 12.

kontruksi sosial sedangkan sex adalah anatomi biologis.<sup>3</sup> Wacana tersebut kemudian menyebar luas terutama di Indonesia, penyebarannya melalui media, ormas, LSM dan lembaga pendidikan, LSPPA merupakan salah satu LSM di Indonesia yang menyuarakan kesetaraan gender terutama melalui program pemberdayaan perempuan.

Aspek yang kedua mengenai dampak pembangunan bandara bertaraf internasional, yaitu Yogyakarta Internasional Airport merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat secara umum mengingat infrastruktur Bandara Adisucipto dirasa oleh banyak kalangan kurang memadai dan terjadi penurunan kualitas layanan.<sup>4</sup> Pembangunan bandara yang memerlukan luas lahan mencapai ribuan meter persegi tersebut tentu menimbulkan suatu dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pembangunan bandara. Dalam konteks perempuan warga terdampak pembangunan bandara dengan situasi perubahan sosial ekonomi di lingkungan sekitar menjadi sebuah tantangan baru bagi warga, terutama perempuan sebagai lapisan paling lemah dalam struktur masyarakat. Hampir semua perempuan yang beralih profesi dari petani, kini menjadi pengangguran.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hilary M Lips, *A New Psychology of Women; Gender, Culture and Ethnicity*, Second Edition (New York: McGrawHill, 2003), 6-7.

<sup>4</sup> *Harian Jogja*, "Bandara Adisucipto Overload", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/01/22/512/570333/bandara-adisutijpto-overload-5-kali-lipat>, diakses tanggal 15 November 2020.

<sup>5</sup> Tirta Id, "Nasib Perempuan Gusuran Bandara YIA dari Petani menjadi Pengangguran", <https://tirta.id/nasib-perempuan-gusuran-bandara-yia-dari-petani-jadi-pengangguran-fhCx>, Diakses Tanggal 26 November 2020.

Selanjutnya, aspek yang ketiga sebagai suatu bentuk upaya dalam mendorong perempuan desa agar dapat berkembang memiliki penghasilan untuk membantu kebutuhan rumah tangga, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) sebagai LSM berkontribusi dalam pembangunan menawarkan sebuah program pemberdayaan sebagai solusi alternatif untuk membantu warga memiliki penghasilan, mengingat perempuan dalam ketahanan pangan dan keberdayaan memiliki peran penting dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga. LSPPA merupakan lembaga di Yogyakarta yang fokus memperjuangkan hak Perempuan dan anak. LSPPA berdiri sejak tahun 1991, lembaga tersebut berperan aktif dalam menerapkan pendidikan tentang gender serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. LSPPA menyebarkan wacana permasalahan sosial akibat dari ketidakadilan gender melalui diskusi, seminar, penerbitan buku dan pendampingan kegiatan ekonomi kelompok perempuan.<sup>6</sup> Pada situasi saat ini LSPPA fokus pada pendampingan masyarakat desa terdampak pembangunan bandara YIA.

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya menyentuh bagian paling lemah (*powerless*) dalam masyarakat.<sup>7</sup> Salah satu lapisan paling lemah yaitu perempuan yang kerap kali diabaikan dan tidak diikutsertakan dalam berbagai aspek pembangunan. Berangkat dari hal tersebut menunjukkan keterlibatan LSPPA dalam mengimplementasikan program pemberdayaan menjadi hal

---

<sup>6</sup> Profil LSPPA, <http://lsppa.or.id/profil-lsppa/>, Website LSPPA ini diakses oleh penulis pada 19 Februari 2017, untuk saat ini Website sudah tidak dapat diakses karena media sosial LSPPA yang aktif saat ini yaitu hanya Facebook, <https://web.facebook.com/lsppa.fanpage>, Diakses tanggal 26 Oktober 2020.

<sup>7</sup> Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), 48.



yang penting mengingat penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan perempuan mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan khususnya dalam keluarga, artinya perempuan mempunyai kemampuan dalam mengatur ketersediaan makanan dalam rumah tangga meski tidak dapat terlepas dari ketergantungan diri perempuan terhadap pemasukan seorang laki-laki.<sup>8</sup> Sehingga upaya-upaya yang bergerak dari lapisan bawah seperti LSPPA menjadi hal yang mendasar dalam memberdayakan perempuan-perempuan desa, agar dapat berkontribusi secara aktif mendorong kesejahteraan masyarakat desa pada lapisan bawah terutama yang sedang terdampak pembangunan infrastruktur.

Mengenai kondisi sosial ekonomi perempuan sebelum adanya pembangunan bandara, mereka merupakan perempuan tani yang berperan dalam peningkatan hasil produksi pertanian melalui upaya yang dilakukan untuk membantu suami baik dalam bercocok tanam maupun panen. Artinya dalam bahasa lain perempuan tani berfungsi sebagai tenaga tambahan dari laki-laki yang mengerjakan ladang atau sawahnya. Selain dianggap sebagai tenaga tambahan bagi suami dalam mengelola pertanian, kedudukan sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas rumahan seperti melahirkan, membesarkan anak serta mengurus suami tersebut menjadi suatu stigma yang berkembang di masyarakat. Meski beberapa dari kelompok perempuan yang

---

<sup>8</sup> Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat, "Perempuan dalam Ketahanan Pangan", <https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/05/12/perempuan-dalam-ketahanan-pangan/>, Diakses tanggal 26 November 2020.

mengungkap bahwa dengan adanya kemajuan zaman muncul berbagai upaya untuk memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pertanian melalui program kelompok tani, namun hal tersebut menjadi beban ganda seorang perempuan yang harus bekerja di sektor pertanian dan domestik.<sup>9</sup>

Berangkat dari sebuah masalah mengenai stigmatisasi terhadap perempuan yang berkembang di masyarakat beserta adanya dampak dari pembangunan bandara tersebut sehingga program pemberdayaan yang dilimpahkan oleh LSPPA menjadi hal penting. LSPPA dalam melakukan program pemberdayaan diaplikasikan melalui kerjasama dengan lembaga donor *Marie Schlei Verein* (MSV) yang kemudian dilimpahkan dalam bentuk program pemberdayaan perempuan warga terdampak pembangunan bandara YIA. Dalam rangka melimpahkan amanah tersebut LSPPA masuk ke desa melalui Aparatur Desa Palihan yang merupakan salah satu desa terdampak pembangunan bandara dengan mengumpulkan sebanyak 40 perempuan berkategori sebagai warga terdampak yang diantaranya warga yang rumah/lahannya tergusur dan warga yang terdampak sosial ekonomi secara umum yaitu lokasi rumahnya sangat berdekatan dengan lokasi pembangunan bandara. Pada tataran pelaksanaan program LSPPA melakukan pendekatan pemberdayaan menggunakan *participatory action research* (PAR) dengan pemanfaatan aset lokal tersebut mencakup pelatihan praktis dengan harapan perempuan mempunyai keterampilan usaha, kemudian pendidikan kritis

---

<sup>9</sup> Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) bersama kelompok perempuan penerima program pemberdayaan yang memiliki latarbelakang sebagai petani pada tanggal 24 Oktober 2020.

dengan harapan perempuan mampu memahami peran, tugas dan tanggungjawab sebagai seorang perempuan.<sup>10</sup>

Selain LSPPA, sampai saat ini masih terdapat pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kulonprogo. Bentuk pendampingannya yaitu dengan membentuk Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri)<sup>11</sup> dalam pelaksanaannya seperti sosialisasi dan pelatihan, pemerintah melibatkan LSM sebagai penggerak. Pemerintah membangun suatu kemitraan kerjasama dengan LSM terutama LSPPA juga berkontribusi di dalam program Desa PRIMA tersebut. Sebuah keterlibatan LSM dalam mengimplementasikan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melibatkan banyak aktor yang membuat hubungan semakin rumit dan bersifat birokratis. Penulis lebih tertarik dengan LSPPA sebagai LSM secara independent melaksanakan pemberdayaan karena LSPPA dapat menyusun visi dan misi yang strategis sesuai dengan sasaran yang dapat mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Posisi relatif independent yang dimiliki LSM tentu jauh dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan seperti di dalam birokrasi pemerintah. Untuk lebih detailnya mengenai pembahasan tentang LSPPA dan kelompok penerima program warga terdampak pembangunan akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Ifa dan Ibu Dwi Juanti LSPPA pada tanggal 11 Mei 2020.

<sup>11</sup> Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo, "Rapat Koordinasi dan Pelatihan Administrasi Keuangan Forum Desa Prima Kabupaten Kulonprogo", <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/532/rapat-koordinasi-dan-pelatihan-administrasi-keuangan-forum-desa-prima-kabupaten-kulon-progo>, Diakses tanggal 26 November 2020.

## B. Rumusan masalah

Selanjutnya, agar lebih terstruktur secara penulisan, berikut adalah rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi perempuan warga terdampak adanya pembangunan bandara YIA?
2. Bagaimana proses pendampingan perempuan warga terdampak pembangunan bandara oleh LSPPA?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tulisan ini bertujuan membahas tentang kondisi sosial ekonomi perempuan warga terdampak Pembangunan Bandara YIA serta kontribusi LSPPA sebagai LSM dalam memberdayakan perempuan warga terdampak pembangunan tersebut. Dalam ranah akademik tulisan ini berkontribusi dalam diskursus mengenai kontribusi LSM, pertama dalam melihat keberlangsungan LSM di Indonesia, kedua tentang penanganan dampak yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur bandara, kemudian yang terakhir terkait aksi pemberdayaan, tulisan ini dapat menggambarkan hubungan antara konsep gender, dampak pembangunan bandara YIA dan pemberdayaan perempuan. Tulisan ini dapat diharapkan memperkaya diskursus tentang pemberdayaan ataupun LSM sehingga diharapkan dapat memberi sumbangan referensi baik secara akademik maupun praktis.

## D. Kajian Pustaka

Diskursus mengenai warga terdampak pembangunan dapat dikelompokkan menjadi empat kecenderungan yang diantaranya yaitu pertama membahas

dampak sosial ekonomi warga terdampak pembangunan, kedua membahas standart kelayakan ganti rugi warga terdampak pembangunan, ketiga tentang peran pemerintah dalam mendampingi warga terdampak pembangunan, dan yang terakhir tentang resolusi konflik pembangunan.

Penelitian yang membahas tentang dampak sosial ekonomi yaitu Happy Susanto dengan judul “Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo” tersebut mengangkat mengenai dampak sosial ekonomi yang dialami oleh warga sekitar pembangunan bandara. Pertama Ia membahas terkait penetapan lahan sebagai tempat pembangunan bandara sudah sahkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan RI No. KP 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Kulonprogo Provinsi DIY, dan kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KP836 Tahu 2014. Selain itu juga diperkuat oleh Keputusan Gubernur Nomor 68/KEP/2015 Tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY.

Selanjutnya pada tataran proses relokasi warga, pemerintah juga melakukan penyuluhan pendampingan dengan pelatihan pelatihan yang diberikan, namun beberapa warga kurang antusias mengikuti pelatihan tersebut dikarenakan warga berasumsi bahwa pendampingan tersebut tidak berkelanjutan, hanya bersifat sementara. Sedangkan dampak sosial ekonomi yang disebutkan yaitu meliputi dampak positif dan negatif. Dampak positif dilihat dari pertumbuhan ekonominya karena akan banyak hotel dan restoran



yang akan di bangun di sekitaran bandara, kemudian bagi masyarakat yang bisa beradaptasi mereka membangun warung makan, kos-kosan atau kontrakan untuk dijual atau disewakan pada karyawan atau pekerja proyek pembangunan bandara. Sedangkan dampak negatifnya sendiri yaitu mengenai aspek sosial karena masyarakat mengalami pertukaran budaya dengan pendatang dari luar. Diketahui kemunculan adanya tempat tempat hiburan karaoke sehingga mempengaruhi mentalitas dan moral masyarakat yang dapat berubah, selain itu lingkungan masyarakat akan mengalami kepadatan wilayah sebagai konsekuensi dari adanya pembangunan.<sup>12</sup>

Keterkaitan tulisan ini yaitu terdapat kesamaan temuan mengenai dampak sosial ekonomi yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan adanya hotel dan restoran disekitaran bandara, selain itu terdapat dampak sosial yaitu ditandai dengan munculnya tempat-tempat hiburan karaoke yang berpengaruh terhadap mentalitas moral warga sekitar. Adapun perbedaan antara tulisan Susanto dengan penulis yaitu mengenai fokus Susanto yang hanya membahas mengenai dampak positif dan negatif sedangkan penulis selain membahas dampak juga fokus pada aksi keterlibatan LSPPA sebagai LSM dalam memberdayakan perempuan warga terdampak.

Selanjutnya penelitian yang kedua membahas terkait standart kelayakan ganti rugi yaitu Agus Suntoro, yang berjudul “Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM” dalam tulisannya Ia fokus pada pembahasan standart kelayakan dan keadilan yang

---

<sup>12</sup> Happy Susanto, “Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Di Kabupaten Kulonprogo,” *Majalah Ilmiah Bijak*. Vol.17, no. 1 (Maret 2020).

diterima warga terdampak pembangunan infrastruktur dalam Undang undang No. 2 Tahun 2012 yang mengatur Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa regulasi ganti kerugian layak dan adil dalam UU No. 2 Tahun 2012 belum menuai kejelasan terkait kriteria yang sesuai dengan norma hak asasi manusia. Selain itu dalam aspek penilaian ganti rugi belum ada standart dan instrumen buku.<sup>13</sup>

Tulisan Suntoro tersebut memberikan gambaran kepada penulis mengenai undang-undang yang mengatur tentang ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum ada standart kelayakan yang ditetapkan secara syah. Selain itu juga belum menuai kejelasan terkait kriteria yang sesuai dengan norma hak asasi manusia (HAM). Pada pelaksanaan ganti rugi warga terdampak pembangunan bandara YIA besar ganti ruginya cukup bervariasi berdasarkan letak lahan yang dimiliki, lahan yang letaknya berdekatan dengan jalan raya dihargai lebih mahal dari pada tanah yang letaknya jauh dari jalan raya.

Tulisan Suntoro memiliki kesamaan dengan penulis pada lingkup kajian pembebasan tanah untuk kepentingan, namun Suntoro lebih fokus mengkaji tentang penilaian ganti rugi yang terdapat pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sedangkan penulis lebih fokus pada dampak dan pelaksanaan program yang dilakukan LSPPA.

---

<sup>13</sup> Agus Suntoro, "Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM," *BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2019).

Kemudian yang ketiga tentang peran pemerintah dalam mendampingi warga terdampak pembangunan ditulis oleh Rizki Ilhami dengan judul Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat. Dalam tulisan tersebut Ilhami fokus pada rencana program pemerintah yang dibahasakan menjadi sebuah aksi pemberdayaan, strategi pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka dalam mengupayakan pengembangan daerah serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan membuat kebijakan sesuai dengan rencana pembangunan BIJB beserta mewujudkan kawasan Kartajati Aerocity yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih proses legalitas.<sup>14</sup>

Artikel yang ditulis oleh Ilhami memiliki kesamaan dalam membahas proses pemberdayaan, adapun letak perbedaannya yaitu Ilhami hanya fokus pada Rencana Pembangunan Daerah dalam mewuhudkan kawasan Kartajati Aerocity yang dibahasakan sebagai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat disekitar Bandara Internasional Jawa Barat. Sedangkan penulis jelas meneliti dampak serta pemberdayaan perempuan warga terdampak yang dilakukan LSPPA secara independent bekerjasama dengan lembaga donor.

---

<sup>14</sup> Rizky Ilhami, "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat," *Jurnal POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2 No. 1 (2019).

Selanjutnya tentang resolusi konflik yang ditulis oleh Khilya Khusnia dengan judul “Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang” tulisan ini menjelaskan wilayah rembang yang memiliki potensi sumber daya alam kapur yang melimpah tersebut menjadi alasan berdirinya pabrik semen yang berkapasitas 3.000.000 ton per tahun di kecamatan Gumen, rencana pembangunan pabrik tersebut mendapat respon penolakan dari beberapa warga sekitar sehingga menimbulkan konflik sosial antara warga pendukung, penolak dan pemerintah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa konflik pembangunan pabrik semen disebabkan oleh 4 faktor yaitu pemicu konflik, pertama tidak adanya sosialisasi pembangunan pabrik semen terhadap warga, kedua penyebab masalah kerusakan lingkungan, ketiga faktor mobilisasi terkait perekonomian warga yang sebagian besar petani, dan terakhir faktor izin lingkungan yang melanggar ketentuan. konflik ini berlangsung dan proses penyelesaiannya melalui proses administrasi dan yudisial, tidak ada upaya penyelesaian konflik melalui perundingan dengan melibatkan warga dalam proses negosiasi.<sup>15</sup>

Sebuah respon penolakan warga terhadap pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang juga terjadi saat pembebasan lahan pembangunan bandara YIA. Sebuah penolakan yang terorganisir dalam organisasi Wahan Tri Tunggal menuai berbagai aksi protes, baik audiensi maupun jalur hukum. Namun adanya pertentangan tersebut tidak mampu merubah keputusan

---

<sup>15</sup> Khilya Khusnia, “Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gumen Kabupaten Rembang,” *Jurnal of Politic and Government Studies*, Vol. 7 No. 2 (Maret 2018).

pemerintah, bagi warga yang tetap kukuh menolak pembangunan tersebut dieksekusi dan penerapan ganti rugi dilaksanakan dengan proses konsinyasi menitipkan ganti rugi pada pengadilan Negeri.

Letak kesamaan yang terdapat pada tulisan Khusnia yaitu terletak pada pembahasan mengenai warga terdampak pembangunan infastruktur, adapun letak perbedaanya terlihat pada fokus pembahasan Khusnia pada resolusi konflik sedangkan penulis fokus mengkaji dampak serta pemberdayaan yang didistribusikan oleh LSPPA kepada kelompok perempuan warga terdampak pembangunan bandara YIA.

Sehubungan dengan pembehasan mengenai pemberdayaan perempuan terdapat Wildan Saugi dan Sumarno dengan judul “Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal”. Artikel ini menjelaskan bahwa melalui pengelolaan bahan pangan lokal dapat memberdayakan perempuan dusun Pagerjirak, Kejobon, Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pelaksanaan terdapat perencanaan partisipatoris untuk mengidentifikasi kebutuhan dusun dan penyiapan tim pengelola program. Kemudian di lanjutkan pada proses pemberdayaan melalui pelatihan dimulai dengan menyiapkan tim pengelola, membentuk kelompok usaha, menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah dan swasta, membangun rumah produksi, mengajukan izin produksi, produksi dan pemasaran produk, melakukan studi banding ke rumah industri rumah tangga, melakukan perbaikan diversifikasi produk, dilanjutkan dengan pelatihan massal dan pendampingan. Adapaun indikator keberhasilannya yaitu mencakup



bertambahnya pengetahuan dan keterampilan warga, serta diperolehnya hasil pendapatan dari penjualan produk yang dikelola. Kemudian mengenai keberlanjutan program dilihat dari adanya pengembangan produk dan kemandirian tim.<sup>16</sup>

Tulisan Saugi dan Sumarno memiliki kesamaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan perempuan dengan menggunakan aset lokal, namun tulisan penulis memiliki permasalahan yang lebih kompleks sehubungan dengan dampak pembangunan bandara. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep gender sebagai kerangka untuk melihat bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan warga terdampak pembangunan bandara. Perbedaan aspek yang lain yaitu mengenai pendidikan kritis yang diberikan kepada perempuan tidak ditemukan di tulisan Saugi dan Sumarno. Lebih jelasnya tulisan yang penulis lakukan lebih kompleks karena penulis menghubungkan antara dampak pembangunan bandara dan bentuk ketidakadilan gender pada perempuan kemudian pemberdayaan perempuan sebagai solusi alternatif untuk meminimalisir masalah akibat dampak pembangunan bandara dan ketidakadilan gender.

Dari lima studi yang menjadi literatur review pada tulisan ini berkontribusi memetakan kajian yang sedang penulis lakukan. Kebijakan pembangunan sarana infrastruktur untuk kepentingan umum, banyak melibatkan aktor serta struktur lapisan masyarakat, mulai dari perusahaan, negara, hingga masyarakat paling bawah. Penulis mengambil gambaran mengenai dampak

---

<sup>16</sup> Wildan Saugi dan Sumarno, "Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengelolaan Bahan Pangan Lokal," *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2 No. 2 (November 2015).



dari pembangunan, standar kelayakan ganti rugi, peran pemerintah, resolusi konflik serta pemberdayaan perempuan menjadi sebuah proses panjang yang terjadi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu konteks pembangunan tersebut dapat dikaji melalui berbagai macam sudut pandang maupun berdasarkan praktik, seperti kajian-kajian yang sudah dilakukan diatas. Dalam rangka memperkaya kajian yang sudah ada, penulis berkontribusi pada peran LSPPA sebagai LSM dalam mendampingi perempuan warga terdampak pembangunan bandara melalui program pemberdayaan.

#### E. Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan perspektif gender sebagai tolak ukur untuk menganalisis situasi dan kondisi yang dialami oleh perempuan sebagai penerima program, sedangkan untuk melihat praktik pemberdayaan akan digunakan kolaborasi teori implementasi kebijakan publik dengan implementasi pemberdayaan guna untuk mengupas peristiwa yang terjadi di lapangan serta untuk menjelaskan proses implementasi atau pelaksanaan program terutama terfokus pada peran LSPPA dalam menjalankan program pendampingan warga terdampak pembangunan bandara YIA.

##### 1. Konsep Gender

Istilah “*gender*” pertamakali dikenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia berdasarkan devinisi yang bersifat sosial budaya atau dari ciri fisik dan biologis. Sebagai kontruksi sosial atau atribut yang dikenakan manusia dari pembentukan kebudayaan gender merupakan *behavioral difference* (perbedaan perilaku) antara laki-laki

dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Bahasa lainnya gender merupakan perbedaan yang bukan sebagai ketentuan Tuhan, melainkan dibentuk oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.<sup>17</sup>

#### **a. Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Menurut Mansour Fakih keadilan gender merupakan kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki yang diwujudkan melalui berbagai upaya untuk memberikan ruang terhadap perempuan dan laki-laki agar dapat berperan bersama-sama dalam ranah ekonomi, politik, sosial dan budaya. Lebih jelasnya keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kesetaraan terhadap perempuan maupun laki-laki.<sup>18</sup>

#### **b. Permasalahan Ketidakadilan Gender**

Fakih menjelaskan bahwa ketidakadilan gender mencakup sebuah perilaku tidak adil terutama pada perempuan dengan bentuk marginalisasi, *subordinasi*, stereotip / pelebelan negatif, perilaku diskriminatif dan beban kerja ganda.<sup>19</sup> Riant Nugroho juga menjelaskan hal serupa bahwa ketidakadilan gender berupa Marginalisasi (Peminggiran/Pemiskinan) banyak ditemui di negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halaman atau kepemilikan lahan dan eksploitasi.<sup>20</sup> Sehubungan dengan

---

<sup>17</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Pembangunannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2-3.

<sup>18</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST-Press, 2008), 12.

<sup>19</sup> *Ibid*, 13.

<sup>20</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Pembangunannya di Indonesia*, 9.

pembangunan bandara YIA yang banyak menggusur atau merelokasi warga baik rumah maupun lahan pertaniannya merupakan suatu tindakan marginalisasi terhadap warga setempat dari kepemilikan lahannya. Meski ganti rugi telah diberikan, namun jika warga tidak dapat mengatur uang ganti rugi tersebut untuk keberlangsungan hidup, maka akan kemiskinan akan menimpah warga tersebut.

Bentuk ketidakkadilan gender yang kedua yaitu subordinasi yang merupakan bentuk keyakinan dengan anggapan salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin yang lainnya.<sup>21</sup> Budaya pemuliaan laki-laki sebagai suami di desa Palihan sebagai salah satu desa yang terdampak pembangunan bandara tersebut pada praktiknya perempuan tani berperan sebagai tenaga tambahan untuk mengerjakan ladang atau sawahnya. Tugas lain sebagai perempuan tani yaitu mengatur urusan rumah tangga seperti memasak, melahirkan, mengurus anak dan mengurus suami, artinya pekerjaan yang dilakukan perempuan dianggap sebagai pekerjaan sampingan atau sebatas tenaga bantu saja. Pekerjaan pokok hanya berada ditangan laki-laki, sehingga laki-laki mempunyai kemuliaan di dalam keluarga.

*Stereotype* (pelebelan) sebagai bentuk ketiga dari ketidakkadilan gender yang mana cintra baku individu atau kelompok yang tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid*

sesuai dengan kenyataan empiris.<sup>22</sup> Seperti sebuah pemuliaan terhadap laki-laki yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi sebuah *stereotype* bahwa ketika seorang laki-laki marah akan dianggap sebagai pribadi yang tegas, namun ketika perempuan marah maka dianggap emosional. Selanjutnya *Violence* (kekerasan) akibat dari ketidakseimbangan pandangan mengenai perempuan dan laki-laki berakibat adanya dominasi untuk mengatur yang mengarah pada perilaku kekerasan terutama terhadap perempuan. Bentuk terakhir dari ketidakadilan gender yaitu beban kerja ganda, hal ini biasa dirasakan oleh perempuan yang harus bekerja diluar pekerjaan rumah tangga dan juga harus menyelesaikan pekerjaan dalam rumah tangga.

**c. Perwujudan Kesetaraan Gender**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu dengan melakukan suatu strategi yang disebut sebagai Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu dengan pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan diberbagai bidang kehidupan pembangunan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 lebih jelasnya dimaksudkan bahwa PUG yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari suatu perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

---

<sup>22</sup> *Ibid*

atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Adapun tujuan dari PUG diantaranya memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender. Memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama terhadap pembangunan dan meningkatkan sensitifitas gender berbagai pihak.<sup>23</sup>

Mengenai upaya yang dilakukan LSPPA dalam pendampingan warga terdampak pembangunan bandara merupakan upaya mendorong perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan. Meski lingkupnya mikro tetapi pemberdayaan yang dilakukan LSPPA merupakan upaya menyentu bagian paling dasar dari struktur masyarakat yaitu perempuan yang memainkan peran dalam keluarga. Lebih jelasnya LSPPA berusaha mendorong perempuan memiliki akses, partisipasi dan kontrol di dalam keluarga mengingat sebuah stigma dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga menjadikan laki-laki lebih terhormat memiliki kontrol terhadap pengelolaan keluarganya, sedangkan perempuan hanya sebagai pelayan yang harus mengikuti perintah suami.

Sehubungan dengan dampak pembangunan bandara, perempuan warga terdampak merupakan masyarakat yang termarginalkan dari kepemilikan tanah yang dimiliki sehingga warga terutama perempuan tidak lagi memiliki pekerjaan sebagai petani akibat dari relokasi lahan

---

<sup>23</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.

untuk pembangunan bandara. selain termarginalkan dari adanya pembangunan bandara tersebut ketika warga menerima ganti rugi yang berlimpah dan adanya stigma laki-laki yang mempunyai peran dominasi dalam keluarga maka keuangan keluarga akan diatur secara penuh oleh laki-laki, termasuk uang ganti rugi yang diterima dari relokasi pembangunan bandara. Pemberdayaan yang dilakukan LSPPA di sini mendorong perempuan agar memiliki peran yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga sehingga terdapat kontrol uang ganti rugi yang diterima dapat dikelola bersama-sama untuk keberlangsungan hidup yang panjang.

## **2. Kebijakan Pembangunan**

Sebelum membahas lebih jauh, penulis akan memetakan fungsi dari teori kebijakan dalam tulisan ini, pertama teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis suatu keputusan pemerintah dalam penetapan lokasi pembangunan bandara YIA. Yang kedua perlu diketahui bahwa pemberdayaan perempuan merupakan bentuk kebijakan sosial, sementara kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik. Dengan demikian upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh LSPPA seperti, pelatihan, pendampingan, sosialisasi dan lain sebagainya merupakan bentuk implementasi dari suatu kebijakan dari LSPPA, sehingga teori kebijakan juga digunakan untuk menganalisis praktik pemberdayaan yang dilakukan LSPPA.



Menurut Mansour Fakih, kata “pembangunan” merupakan sebuah kata benda netral yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan infrastruktur.<sup>24</sup> Dari definisi tersebut kita dapat memetakan pembangunan bandara YIA sebagai pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan daerah Yogyakarta, bahwa tujuan dari pembangunan ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat.<sup>25</sup> Selain itu berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Indonesia No. KP 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Kulonprogo Provinsi DIY, yang sudah diubah menjadi keputusan menteri Perhubungan RI No. KP 836 tahun 2014, dan juga diperkuat dengan keputusan gubernur No. 68/KEP/2015 Tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru DIY tersebut menjadi sebuah landasan kuat dibangunnya Bandara YIA.

Kebijakan pembangunan bandara tentu mengakibatkan adanya dampak yang menimpa warga sekitar. Terdapat empat dampak yang akan dirasakan masyarakat ketika ada pembangunan, pertama dampak *positif*, yaitu dampak yang dianggap baik oleh penyelenggara pembangunan atau

---

<sup>24</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: INSIST. 2006), 10.

<sup>25</sup> Pemerintah Provinsi DIY. 2016. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Yogyakarta. Yogyakarta: Pemrov DIY, 390, Dibawah “Setting,” [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd\\_dan\\_rkpd\\_provinsi/DI%20Yogyakarta/RKPD%20DI%20Yogyakarta%202016.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/DI%20Yogyakarta/RKPD%20DI%20Yogyakarta%202016.pdf), diakses tanggal 18 Oktober 2020.

pihak lain. Kedua dampak *negatif* yaitu dampak yang tidak dianggap baik oleh penyelenggara pembangunan atau pihak lain. Ketiga dampak yang disadari yaitu dampak yang sudah direncanakan oleh penyelenggara, dan diketahui akan terjadi (*fingsi manifes*), keempat dampak yang tidak disadari yaitu dampak yang tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan (*fungsi laten*).<sup>26</sup> Gambaran terkait teori dampak pembangunan diatas akan digunakan untuk menganalisis dampak yang terjadi akibat dari kebijakan pembangunan bandara YIA.

Adanya dampak yang menimpa lingkungan sekitar sehingga perlu adanya kebijakan dalam upaya pemberdayaan atau pendampingan terhadap warga terdampak. Dalam teori Implementasi kebijakan, dijelaskan bahwa implementasi kebijakan akan melibatkan banyak aktor jika target pencapaiannya semakin makro, misal seperti kebijakan pengurangan jumlah kemiskinan akan melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi, kabupaten, kecamatan, desa, maupun LSM terkait. LSPPA sebagai LSM yang terfokus pada pengembangan perempuan berperan aktif dalam mengkampanyekan perlindungan perempuan melalui berbagai program pendampingan. Kompleksitas implementasi bukan ditunjukkan oleh berapa banyak aktor atau unit organisasi yang terlibat, namun proses implementasi juga dipengaruhi oleh berbagai variabel individual maupun variabel organisasional, masing-masing variabel tersebut akan saling berinteraksi, untuk itu penulis melihat

---

<sup>26</sup> Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer* (Padang: Universitas Andalas Press, 2006).

berbagai variabel tersebut yang terdapat di LSPPA. Pada tataran implementasi kebijakan secara teori dijelaskan oleh George C. Edwards III sebagai berikut:

Menurut Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang diantaranya: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan yang terakhir struktur birokrasi.<sup>27</sup>

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan implementor agar mengetahui apa yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran agar tidak terjadi distorsi implementasi. Komunikasi ini digunakan untuk melihat praktik komunikasi yang ada pada pelaksanaan program pemberdayaan warga terdampak pembangunan bandara oleh LSPPA. Selain itu variabel komunikasi ini juga digunakan penulis untuk melihat pola komunikasi kelompok, bagaimana kekompakan kelompok.

b. Sumberdaya

Kebutuhan sumberdaya harus seimbang dengan sebuah program yang harus dilakukan, sumberdaya sendiri meliputi sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Dalam konteks praktik pemberdayaan variabel sumberdaya ini digunakan untuk melihat kapasitas sumberdaya LSPPA sebagai pelaksana program, apakah sumberdaya manusianya sudah cukup

---

<sup>27</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 90.

mempuni untuk melakukan pemberdayaan. Kemudian secara finansial apakah dana yang diberikan Lembaga donor/funding cukup membeakup seluruh kebutuhan kegiatan pemberdayaan tersebut. Selanjutnya variabel sumberdaya juga digunakan untuk menganalisis sumberdaya kelompok sebagai penerima program apakah masyarakat berperan partisipatif dalam program.

c. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti, komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Pada variabel disposisi digunakan penulis untuk menganalisis karakter atau watak dari team LSPPA sendiri, seperti kejujuran dan komitmen dalam menyampaikan amanah yang diberikan oleh lembaga donor.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, sehingga SOP (*Standard operating procedures*) sebagai pedoman yang penting dalam tindakan implementor. Dalam konteks birokrasi LSPPA penulis akan melihat struktur kepengurusan kemudian SOP sebagai pedoman apakah ada dan digunakan sebagaimana mestinya.

### 3. Keterlibatan LSM dalam Pemberdayaan & Pembangunan

Pada bagian ini penulis ingin memetakan Konsep dan Teori Pemberdayaan serta bagaimana LSM dapat berkontribusi dalam pembangunan secara terperinci agar dapat dipahami lebih mudah. Makna

dari konsep merupakan sebuah ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kalimat atau symbol. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penguatkan modal sosial masyarakat atau kelompok untuk dijadikan sebagai kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam sebuah konsep pemberdayaan banyak yang menekankan pentingnya sebuah partisipasi masyarakat, artinya meski pembangunan cirinya banyak yang dilakukan secara *top-down*, namun diharapkan tetap jangan melupakan proses partisipasi masyarakat dari bawah yaitu model *bottom-up* karena *Empowerment* sejatinya merupakan sebuah kekuatan dari bawah. Pendekatan tersebut meyakini bahwa pemegang kunci untuk perkembangan sumberdaya daerah, alam, manusia dan budaya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dikategorikan menjadi dua arah yaitu melepaskan dari belenggu kemiskinan/keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Secara umum tujuan pemberdayaan yaitu usaha melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau capaian yang diinginkan seperti perubahan sosial yang diantaranya masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupaun sosial seperti memiliki partisipasi dalam kegiatan sosial, mandiri dalam melakukan tugas-tugas hidupnya.

Menurut Hulme dan Turner secara praktik pembangunan di negara berkembang banyak didominasi oleh pemerintah sebagai kekuatan yang lebih dekat dengan kekuasaan. Berangkat dari hal tersebut maka dapat dipahami masyarakat sebagai kekuatan yang jauh dari kekuasaan akhirnya masyarakat hanya sebagai obyek dari pembangunan. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak berdaya tidak memiliki *Self Respect* (pengakuan diri), *Self Confident* (percaya diri), *Self Reliance* (kemandirian).<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Amartya Sen masalah utama di negara berkembang lebih pada kurangnya pengakuan makna hidup (*reduced lives*) dari pada rendahnya pendapatan masyarakat. Untuk itu Sen menawarkan sebuah strategi untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan meningkatkan kebebasan dan kemampuan umat manusia dalam memilih nilai suatu yang diyakini.<sup>29</sup> Berangkat dari dua teori diatas yang memperhatikan masalah atau praktik pembangunan di negara berkembang maka dapat diketahui sebuah praktik pembangunan yang melihat masyarakat hanya sebagai obyek dari pembangunan tersebut kurang memberikan kebebasan atau ruang kepada masyarakat untuk berekspresi, berpendapat dan berpartisipasi dalam jalannya sebuah proses pembangunan.

Sebuah kelemahan atau keterbatasan yang ada pada praktik pembangunan berkonsep sentralistik *top-down* tersebut merespon sebuah

---

<sup>28</sup> David Hulme & Mark M. Turner, *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*. (Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1990).

<sup>29</sup> Amartya Sen. *Resource, Values, and Development* (New York: Wiley, 1984).



gerakan dari bawah yang digerakkan oleh aktor organisasi non negara atau *non governmental* tersebut yang tersebar ditingkat lokal, nasional dan internasional ikut berkontribusi banyak dalam pembangunan. Menurut Hagul terdapat 5 ciri sebagai identitas NGO's/LSM, pertama yaitu menjangkau masyarakat bagian paling miskin, kedua bentuk pemberdayaannya berkonsep partisipasi atau *bottom-up* ketiga secara kepengurusan tidak birokratis, keempat dapat bereksperimen dan yang terakhir biaya pelayanan murah bahkan gratis.<sup>30</sup>

Sedangkan Peran NGO's dalam memberdayakan masyarakat menurut Hagul dapat dirumuskan sebagai berikut, pertama peran fasilitator dan katalisator, kedua peran pelatihan dan pendidik, ketiga peran pemupuk modal, dan terakhir peran penyelenggara proyek.<sup>31</sup> Dalam sebuah praktik keterlibatan NGO's dalam pembangunan, tidak selamanya negara dan NGO's dapat bekerjasama menjalankan program bersama, karena terkadang ada sebuah pertentangan karena adanya kepentingan yang berbeda, oleh karena itu hubungan antara NGO's dengan pemerintah dibagi menjadi 3 pola berdasarkan pengamatan Hugel, pertama hubungan asosiatif yaitu NGO's sering dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, kedua hubungan pararel yaitu NGO's sebagai mitra sejajar karena hubungan kerjasama dengan pemerintah, ketiga hubungan konfliktif yaitu NGO's mengambil jarak

---

<sup>30</sup> Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1992).

<sup>31</sup> *Ibid*

dengan pemerintah karena membela kepentingan kelompok yang berbeda.<sup>32</sup>

Selanjutnya sebuah diskursus teori tentang praktik pembangunan beserta pemberdayaan yang dilakukan NGO's tersebut digunakan penulis untuk menganalisis praktik pembangunan infastruktur Bandara YIA sebagai bentuk kebijakan dari pemerintah yang bersifat *Top-down* tersebut hingga menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan oleh warga sekitar pembangunan bandara. Kemudian sebagai upaya tanggung jawab pemerintah terhadap warganya berbagai praktik ganti rugi serta pelatihan pemberdayaan dilakukan di sekitar kawasan pembangunan bandara, tidak hanya pemerintah yang bergerak secara *buttom-up* memberikan pelatihan kepada masyarakat, namun beberapa LSM/NGO's juga berkontribusi dalam pembangunan. Seperti halnya LSPPA yang diteliti oleh penulis sebagai salah satu NGO's yang berkontribusi dalam pemberdayaan warga sekitar pembangunan bandara. pada bagian selanjutnya teori ini juga digunakan untuk melihat ciri dan peran LSPPA sebagai NGO's dalam melakukan pemberdayaan, kemudian juga melihat relasi hubungan LSPPA dengan pemerintah apakah asosiatif, pararel atau konflikatif.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, sebab data yang diperoleh dari penelitian ini berbentuk kata-kata lisan maupun tertulis dan

---

<sup>32</sup> Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1992).

tingkah laku individu atau kelompok yang dideskripsikan menjadi sebuah kalimat.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret-Oktober 2020 pada Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) yang mendampingi kelompok perempuan warga terdampak pembangunan bandara YIA. Subyek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang bekerja di LSPPA yaitu Ibu Ifa, Ibu Dwi dan Bapak Agus sebagai pelaksana program pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Desa Palihan Kecamatan Temon Kulonprogo, serta anggota kelompok sebagai penerima program pemberdayaan yang terdiri dari Ibu Riyanti ketua umum serta ketua kelompok Padukuhan Palihan I, Ibu Umriyah sebagai ketua kelompok Padukuhan Palihan II, Ibu Siti Jumiyatun ketua kelompok Padukuhan Mlangsen beserta anggotanya. Sedangkan terkait metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap situasi aktivitas individu atau kelompok di lokasi penelitian.<sup>34</sup> Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan atau aktivitas-aktivitas pendampingan yang dilakukan LSPPA di kelompok perempuan masyarakat desa terdampak pembangunan bandara. Pengamatan secara langsung dilakukan dua kali oleh penulis dengan mengikuti kegiatan kelompok, keterbatasan akses akibat dari larangan

---

<sup>33</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2014), 131- 132.

pemerintah desa untuk melaksanakan perkumpulan, membuat kegiatan yang seharusnya dilakukan setiap minggu sekali menjadi berbulan-bulan tanpa kegiatan. Dua kegiatan yang diikuti penulis pada tanggal 1 dan 20 Oktober 2020, kegiatan tersebut merupakan rutinitas yang lama tidak dilakukan selama adanya pandemi Covid-19. Pada kegiatan yang diikuti penulis tersebut bertepatan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi (MONEV) serta penyaluran bantuan modal usaha yang dilakukan LSPPA. Pada tanggal 1 Oktober 2020 hampir seluruh anggota mengikuti perkumpulan. Kegiatan dilakukan di Balai Desa, acara tersebut tidak berlangsung lama sekitar 10-15 menit akibat larangan berkumpul dari pemerintah desa, namun karena adanya negosiasi yang dilakukan oleh LSPPA terhadap pemerintah desa, kegiatan tersebut dapat berjalan meski hanya sebentar.

Tanggal 20 Oktober 2020 kegiatan dilakukan di rumah ketua umum kelompok yaitu Ibu Rianti yang terdiri dari perwakilan 3-4 orang ketua, sekretaris dan bendahara dari perwakilan kelompok kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober untuk mendiskusikan lebih lanjut sistematisasi proses simpan pinjam uang modal usaha yang dikelola oleh kelompok. berdasarkan pengamatan penulis masyarakat terlihat antusias dalam kelompok dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, meski dalam pelaksanaannya mereka tetap berhati-hati menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pembicaraan yang memiliki tujuan tertentu, dan pembicaraan tersebut terlebih dulu didahului oleh pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan orang yang berkepentingan kepada subyek yang diwawancarainya.<sup>35</sup> Wawancara yang dilakukan penulis terfokus pada dua subyek penelitian yakni tim LSPPA sebagai aktor implementor serta masyarakat yang telah menjadi penerima program Pemberdayaan. Wawancara ini dilakukan penulis dengan pihak LSPPA yaitu Ibu Ifa sebagai mantan direktur yang masih aktif berkontribusi dalam kegiatan/program LSPPA. Kemudian dengan Bapak Agus yang merupakan Devisi Litbang dan beliau banyak membecekup semua urusan prosedur kontrak dengan lembaga donor serta pemerintah, kemudian membuat skejul, laporan tentang jalannya kegiatan dan lain sebagainya. Selanjutnya Ibu Dwi selaku Pendamping Lapangan program pemberdayaan perempuan, beliau merupakan aktor yang sangat penting dalam jalannya kegiatan pemberdayaan ini, mengingat perannya sebagai pendamping lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga lebih tahu kondisi-kondisi lapangan.

Wawancara kepada pihak LSPPA di dilakukan beberapa kali pertemuan dan tanya jawab secara online selama penelitian, pertama wawancara dilakukan dengan Bapak Agus pada tanggal 11 Maret 2020, dilanjutkan wawancara yang kedua tanggal 9 Mei 2020 dan wawancara yang ketiga dilakukan tanggal 6 Oktober 2020, tiga pertemuan wawancara

---

<sup>35</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 160.



yang dilakukan penulis dengan Bapak Agus bertepatan di rumah beliau. Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Ibu Ifa dilakukan secara online akibat dari situasi pandemi sehingga beliau tidak mau ditemui secara langsung, hal tersebut dilaksanakan tanggal 12 Mei 2020, wawancara tersebut dilanjutkan tanya jawab melalui whatsapp mengenai kontribusi LSPPA terutama program pemberdayaan perempuan warga terdampak pembangunan bandara. Wawancara berikutnya dilakukan bersama Ibu Dwi tanggal 30 Februari 2020 bertepatan di gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara selanjutnya dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 bertepatan di rumah beliau, kemudian dilanjutkan wawancara berikutnya yang dilakukan bersamaan dengan perkumpulan kelompok perempuan tanggal 20 Oktober 2020.

Sedangkan untuk wawancara kepada warga penerima program, penulis mengambil 9 orang sebagai sample perwakilan dari 40 anggota yang ada pada kelompok tersebut diantaranya yaitu Ibu Riyanti ketua umum serta ketua kelompok Padukuhan Palihan I, Ibu Safitri Sekretaris Palihan I, Ibu Wianti Bendahara Palihan I, Ibu Umriyah ketua Palihan II, Ibu Susanti Sekretaris Palihan II, Ibu Astuti Bendahara Palihan II, Ibu Wagiyem ketua I Mlangsen, Ibu Jumiyatun ketua II dan Sekretaris Mlangsen, terakhir Ibu Rusmini bendahara Mlangsen. Wawancara dilakukan dengan dua metode yaitu dengan membentuk *forum group discussion* (FGD) dan secara individu satu-persatu diberi pertanyaan yang



sudah disiapkan penulis secara terperinci fokus pada data yang dibutuhkan. Wawancara bersama kelompok dilakukan tanggal 20 Oktober 2020, setelah membentuk FGD penulis mencoba mendekati dengan wawancara satu persatu. Situasi ini warga terlihat berantusias menjawab pertanyaan penulis, ada beberapa warga yang mempunyai catatan tertulis secara rapi mengenai pertemuan-pertemuan yang dilakukan selama jalannya program sehingga penulis dapat menggali secara detail mengenai program-program yang sudah dilakukan. Meski terdapat juga beberapa warga yang terkesan terburu-buru ingin pulang karena kepentingan keluarga, namun wawancara yang dilakukan tersebut dirasa cukup valid dan kaya data yang dibutuhkan untuk menyusun tesis ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumberdata yang didapatkan dari catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya orang lain yang bersangkutan dengan data penelitian yang dibutuhkan.<sup>36</sup> Dokumentasi ini didapatkan penulis melalui proses pengumpulan data tentang dokumen atau naskah terkait implementasi program Pendampingan warga terdampak pembangunan bandara. Dokumen atau naskah terkait program pemberdayaan ini diperoleh penulis melalui laman facebook resmi LSPPA serta meminta langsung kepada pihak LSPPA. Selain itu terdapat laporan/berita yang menyangkut

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2009), 82.

tentang penelitian ini juga dijadikan sebuah dokumen informasi untuk memperkuat.

Selanjutnya tahapan dalam penelitian ini setelah pengumpulan data sudah dilaksanakan, maka dilakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga langkah berikut<sup>37</sup>:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan cara untuk memilih dan memilah, penyederhanaan, transformasi data yang mulanya kasar dari lapangan menjadi lebih fokus sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Pada bagian reduksi data semua hasil wawancara observasi dan dokumentasi yang didapatkan oleh penulis selanjutnya di pilih informasi-informasi yang termasuk bagian dari data yang dibutuhkan akan disatukan menjadi informasi yang terfokus pada praktik pemberdayaan warga terdampak pembangunan Bandara YIA.

2. Penyajian Data

Hal ini merupakan bentuk penyajian sekumpulan data yang telah di pilih menjadi sebuah deskriptif peristiwa di lapangan yang kemudian akan ditarik menuju kesimpulan. Penyajian data ini dilakukan dengan memaparkan informasi-informasi yang didapatkan baik dari pihak LSPPA maupun dari kelompok warga penerima program menjadi sebuah narasi

---

<sup>37</sup> Matthew B. Milles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 2007), 16-18.

yang disusun penulis dan dianalisis menggunakan berbagai perspektif teori pemberdayaan/pembangunan dan kebijakan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan menyimpulkan seluruh narasi tentang peran LSPPA dalam mendampingi warga terdampak pembangunan Bandara YIA yang sudah ada menjadi sebuah proposisi hasil dari narasi panjang yang sudah disajikan sebelumnya.

### G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disajikan menjadi lima bab yang diantaranya yaitu: **Bab Pertama**, terdiri atas pendahuluan. Bab ini berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan. **Bab kedua** memuat deskripsi tentang potret keberlangsungan LSM di Indonesia kemudian diikuti oleh deskripsi terkait gambaran umum LSPPA yang berisi sejarah, visi misi, tujuan dan lembaga donor LSPPA. Selanjutnya gambaran umum kelompok penerima program, kepengurusan kelompok dan yang terakhir gambaran program pemberdayaan.

**Bab ketiga**, membahas tentang proses kebijakan pembangunan bandara, kemudian diikuti oleh kondisi sosial ekonomi warga terdampak pembangunan bandara dan lebih spesifik dampak yang dialami oleh perempuan. Selanjutnya membahas program-program LSPPA yang mencakup implementasi program pemberdayaan, faktor pendukung dan

penghambat serta yang terahir rencana keberlanjutan program. **Bab keempat** berisi analisis hasil penelitian yang menggambarkan keterkaitan dampak pembangunan bandara, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Lebih terperinci sub-babnya yaitu berisi keterkaitan dampak pembangunan bandara dan pemberdayaan, mendorong partisipasi perempuan melalui pemberdayaan, kemudian ciri dan peran LSPPA dalam melakukan program pemberdayaan dan yang terahir pengaruh variabel keberhasilan program pemberdayaan **Bab kelima** merupakan Bab penutup dengan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan dilangkapi oleh saran dari penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian terakhir dalam kajian ini, penulis menyimpulkan beberapa point dalam keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan diatas. Beberapa point yang menjadi fokus dalam pembahasan yaitu *pertama* kebijakan pembangunan bandara merupakan bentuk pembangunan dengan model *top-down* dengan harapan terjadi adanya efek pertumbuhan ekonomi disekitar bandara. harapan adanya efek pertumbuhan ekonomi disekitar pembangunan merupakan bentuk praktik dari sebuah teori *trickle down effect*. Secara praktik berangkat dari argumen atas keterbatasan bandara lama yaitu Bandara Adisucipto yang dirasa kurang memadai secara kapasitas serta kualitas pelayanan yang semakin menyusut, berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Indonesia No. KP 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Kulonprogo Provinsi DIY, yang sudah diubah menjadi keputusan menteri Perhubungan RI No. KP 836 tahun 2014, dan juga diperkuat dengan keputusan gubernur No. 68/KEP/2015 Tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru DIY menjadi landasan kuat dalam pembangunan bandara tersebut. Meski dalam praktiknya menuai berbagai perlawanan dari warga yang tidak sepakat, namun pemerintah tetap memenangkan negosiasi dan menetapkan lokasi pembangunan secara syah.

*Kedua* tentang kondisi sosial ekonomi warga terdampak pembangunan berdasarkan pada apa yang dirasakan warga dapat dipetakan menjadi dua yaitu, dampak yang terjadi dan dampak yang dikhawatirkan akan terjadi. Dampak yang terjadi yaitu dampak sosial antara lain adanya pendatang dari luar sehingga terdapat pertukaran budaya, terutama munculnya tempat hiburan karaoke sebagai wujud dari masuknya budaya luar yang menjadi tantangan baru secara moral bagi warga setempat. Kemudian dampak ekonomi yaitu warga lahannya direlokasi maka mendapat ganti rugi berupa uang dengan nilai jual diatas rata-rata harga standart tanah diwilayah tersebut, kemudian warga mengalami kebingungan karena harus beralih profesi yang awalnya menjadi petani harus mencari matapencaharian yang lain. Dampak ekonomi selanjutnya yaitu tumbuhnya kegiatan ekonomi disekitar bandara ditandai oleh dibangunnya hotel, restoran dan tempat perbelanjaan disekitar bandara. Sedangkan mengenai dampak yang dikhawatirkan yaitu ditakutkan warga tidak dapat mengatur uang ganti rugi yang diterima dari lahan pertanian/usahanya yang terelokasi dan dikhawatirkan muncul adanya tempat prostitusi dilingkungan warga.

*Ketiga* setelah mengetahui sebuah bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah hingga menimbulkan sebuah dampak yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu peran LSPPA dalam mendampingi warga terdampak pembangunan bandara menjadi penting untuk dibahas. Dalam implementasi program pemberdayaan terdapat beberapa hal penting yang dilakukan yaitu antara lain proses masuknya LSPPA pada warga terdampak yang melibatkan



perangkat desa, kemudian strategi yang digunakan yaitu berupa PAR dengan memanfaatkan aset lokal, kemudian peran yang dilakukan yaitu berupa peran membantu pemetaan masalah, peran konsultan, peran pendidikan dan peran fasilitator. Mengenai faktor pendukung dalam melakukan pemberdayaan yaitu antara lain, ketersediaan pendamping LSPPA yang bersungguh-sungguh dalam melakukan pendampingan, adanya kemauan penerima program untuk berpartisipasi, adanya lembaga donor yang memberikan suntikan dana untuk keberlanjutan program, dan adanya kegiatan PUSPA yang sebelumnya pernah dilakukan sebelum LSPPA masuk secara independen sehingga memudahkan LSPPA masuk dan melakukan programnya. Sedangkan faktor penghambat dari program ini yaitu adanya penyebaran virus covid-19 yang melarang adanya pertemuan kelompok, sehingga programnya terhambat, kemudian ketertinggalan beberapa individu dari kelompok tersebut yang masih belum menemukan ide usaha yang akan dilakukan.

Secara garis besar dapat dipahami program pemberdayaan perempuan yang dilakukan LSPPA mencakup tiga fungsi untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada dampak pembangunan bandara. **Pertama**, pemberdayaan perempuan sebagai solusi alternatif bagi perempuan warga yang terdampak kehilangan pekerjaan sebagai petani atau tahanan pertaniannya terelokasi, dengan diberikan pelatihan kewirausahaan melalui pelatihan praktis pembuatan olahan makanan dan keterampilan kemudian materi manajemen keuangan dalam berjualan, selain itu disokong juga melalui pemberian bantuan modal usaha. Pembekalan-pembekalan tersebut diharapkan dapat

dimanfaatkan oleh kelompok dengan baik, dikembangkan untuk membuka usaha sebagai gantinya pekerjaan sebagai petani.

**Kedua**, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan LSPPA sebagai upaya perlindungan/pencegahan bagi perempuan warga terdampak yang tanahnya terlokasi dan menerima ganti rugi yang berlimpah dikhawatirkan tidak dapat mengatur uang untuk keberlanjutan hidup selanjutnya. Hal tersebut diberikan solusi LSPPA melalui materi-materi yang telah diberikan, tentang bagaimana mengelola uang dalam rumah tangga, dan pendamping yang selalu menekankan agar uang ganti rugi tidak diumbar-umbar untuk kepentingan yang sesaat. Selain itu upaya pencegahan juga diberikan agar dari keluarga perempuan yang mengikuti program tidak terjerumus pada budaya yang mengarah pada pergaulan bebas, seperti gejala yang terjadi adanya tempat hiburan karaoke yang dikhawatirkan akan merambat adanya prostitusi dan *trafficking*.

Fungsi **ketiga**, pemberdayaan yang berupa pemberian keterampilan, pendidikan kritis dan pemberian bantuan modal yaitu meujudkan mendorong kesetaraan perempuan dan laki-laki agar memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama. pendidikan partikis dan bantuan modal diberikan agar kelompok perempuan warga terdampak dapat mengembangkan usaha sebagai ganti pekerjaan tani. Selain itu dilihat dari perspektif gender dengan mendorong perempuan memiliki penghasilan, diharapkan perempuan dapat memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama di dalam keluarga dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pendidikan kritis diberikan kepada

kelompok perempuan agar selain mempunyai usaha sebagai penyokong ekonomi keluarga, perempuan juga dapat berfikir kritis tentang hak-hak sebagai perempuan, kesetaraan gender dan pengelolaan keuangan rumah tangga serta kewirausahaan.

## B. Saran

Penulis sadari secara menyeluruh tulisan ini memiliki banyak kekurangan, seperti halnya tulisan ini yang ruang lingkup pembahasannya hanya membahas satu kelompok perempuan yang dianggap mewakili sebagai warga terdampak pembangunan bandara. Selain itu program pemberdayaan dalam tulisan ini hanya fokus pembahasan tentang aksi LSPPA sebagai LSM yang aktif berkontribusi dalam pembangunan. Tentu masih banyak kelompok-kelompok lain dengan program pemberdayaan yang dialokasikan oleh lembaga swasta maupun pemerintah.

Mengenai pembahasan akademik terkait kontribusi LSM dalam pembangunan di era kontemporer ini, penulis menyarankan adanya kajian tentang kolaborasi LSM dengan pemerintah terutama LSM-LSM yang mempunyai hubungan kedekatan khusus dengan pemerintah. Hubungan kedekatan tersebut apakah saling menguntungkan atau LSM hanya dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Hal tersebut belum penulis bahas secara detail dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis menyarankan studi tentang LSM selanjutnya dapat menulis tentang tema tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA:

- A. Perdana, Ari & John Maxwell. Poverty Targeting in Indonesia dalam Poverty Targeting in Asia, adited By John A Weiss A John. Publication of The Asia Development Bank Institute and Edward Elgar Publishing. 2005.
- Afrizal. Sosiologi Konflik Agraria: Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer. Padang: Universitas Andalas Press. 2006.
- Agung Pratama, Aditya. Penyebab Munculnya Gerakan Wahana Tri Tunggal di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2016.
- Agung Pratama, Aditya. Penyebab Munculnya Gerakan Wahana Tri Tunggal di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Alisyahbana. Pembangunan dari tingkat Bawah keatas. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2003.
- Anam, Afiful. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin oleh Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Di Dusun Polaman, Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Anwas. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta. 2014.

- B. Milles, Matthew and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press. 2007.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST-Press, 2008.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST. 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hagul, Peter. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 1992.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika. 2014.
- Hulme, David & Turner M. *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf. 1990.
- Jim ife & Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Sastrawan Manullang. Nurul Yakin, M. Nursyahid (Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- M Lips, A Hilary. *New Psychology of Women; Gender, Culture and Ethnicity*, Second Edition. New York: McGrawHill, 2003.

- N., Mitsuo. Introduction, "Islam & Civil Society in Southeast Asia (Editor: Nakamura Mitsuo, Sharon Shiddique, Omar Farouk Bajunid). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2001.
- Nafisah, Linatun. Pemberdayaan Perempuan melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP) di Desa Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Nata Braja, Ageng. Distorsi Peran Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan, Universitas Diponegoro Semarang. 2009.
- Nugroho, Riant. Gender dan Pembangunannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, (Jakarta, LP3ES, 2008).
- Perdana, Ari A. & John Maxwell. Poverty Targeting in Indonesia dalam Poverty Targeting in Asia. John A Weiss A John (Ed.), Publication of The Asia Development Bank Institute and Edward Elgar Publishing. 2005.
- Rowbotham, Sheila. Women in Movement: Feminism and Social Action. New York: Rountledge, 1992.
- Sen, Amartya. Resource, Values, and Development. New York: Wiley. 1984.
- Soetomo. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.



Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA, 2009.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana, 2010.

Taufiqur Rohman, Ahmad. Penysadaran Kritis tentang Perlindungan Anak pada Perempuan Desa: Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama (KUB) Lestari Desa Banjarasri, Kalibawang, Kulonprogo. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Taufiqurakhman. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maestopo Beragama (Pers). 2014.

White, G. Civil Society, Democratization, and Development(I): Clearing the Analytic Ground". Democratization, 1994.

JURNAL:

Assa'di, Husain. "Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tengah Kepentingan Donor." Sodality; Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 3 No. 2. Agustus 2009.

Azizah, Nur. Dampak Sosial Ekonomi Pembebasan Lahan Pembangunan Bandar Udara (New International Airport) (Studi Kasus Kecamatan Temon,

Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta), Jurnal Ilmu Politik. Vol. 8 No.2. Oktober 2017.

Ilhami, Rizky. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat. Jurnal POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

Isnaeni. “Peran Pendamping Kegiatan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta di Kulonprogo.” Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 8 No. 7 Tahun 2019.

Khusnia, Khilya. “Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gumen Kabupaten Rembang.” Jurnal of Politic and Government Studies. Vol. 7 No. 2 Maret 2018.

Latifah Letty Azizi, Nyimas. “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa.” Jurnal Ilmu Politik, Vol. 13 No. 2 Desember 2016.

Saugi, Wildan dan Sumarno. Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengelolaan Bahan Pangan Lokal. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 2 No. 2. November 2015.

Suntoro, Agus. “Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM.” BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan. Vol. 5 No. 1. Mei 2019.

Suradi, Kolaborasi LSM dengan Pemerintah “Kajian tentang pengembangan kolaborasi LSM dengan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat. Jurnal Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial. vol. 8 No. 3 September 2003.

Susanto, Happy. Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Di Kabupaten Kulonprogo. Majalah Ilmiah Bijak. Vol.17, No. 1. Maret 2020.

WEB:

Berita Banda Baro Bukan berita Bohong. “Siapa Kader Desa” <https://www.beritabandabaro.com/2016/10/siapa-kader-desa.html> diakses pada 3 November 2020.

Berita Satu “Pembangunan Akses ke Bandara YIA Perlu dipercepat” <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/nasional/592772/pembangunan-akses-ke-bandara-yia-perlu-dipercepat>. Diakses pada 1 November 2020.

Desa PRIMA merupakan singkatan dari Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri, <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/532/rapat-koordinasi-dan-pelatihan-administrasi-keuangan-forum-desa-prima-kabupaten-kulon-progo> diakses pada 15 November 2020.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang “Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan

dan

Anak”.

<https://dpmppa.jogjakota.go.id/assets/instansi/dpmppa/files/puspa-3795.pdf.pdf> diakses pada 3 November 2020.

Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo, “Rapat Koordinasi dan Pelatihan Administrasi Keuangan Forum Desa Prima Kabupaten Kulonprogo”, <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/532/rapat-koordinasi-dan-pelatihan-administrasi-keuangan-forum-desa-prima-kabupaten-kulonprogo>, Diakses pada 26 November 2020.

Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat, “Perempuan dalam Ketahanan Pangan”, <https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/05/12/perempuan-dalam-ketahanan-pangan/>, Diakses pada 26 November 2020.

Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) DPMPP Jogjakarta. <https://dpmppa.jogjakota.go.id/assets/instansi/dpmppa/files/puspa-3795.pdf.pdf> Diakses pada 30 Oktober 2020.

Harian Jogja, Bandara Adisucipto Overload 5 Kali lipat <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/01/22/512/570333/bandara-adisutjipto-overload-5-kali-lipat> diakses pada 15 November 2020.

IDN Times, “Janji Kerja Sebatas Iming-iming” dalam “Cerita Perempuan Korban Pengusuran YIA, Bersiasat demi Bertahan Hidup”, <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/cerita->

[perempuan-korban-pengggusuran-yia-bersiasat-demi-bertahan-hidup](#),

diakses pada 1 Januari 2021.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang  
“Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden  
Republik Indonesia.”

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf> diakses pada 4 Januari 2021.

Jawa Pos “Kulonprogo dukung Percepatan Pembangunan Jalan Bandara YIA-  
Borobudur” <https://www.jawapos.com/infrastruktur/17/07/2020/kulon-progo-dukung-percepatan-pembangunan-jalan-bandara-yia-borobudur/>.

Diakses pada 2 November 2020.

[JPNN.com](#). "Pakar Ekonomi: Bansos untuk Karyawan Akan Menciptakan  
Trickle-down Effect",  
<https://www.jpnn.com/news/pakar-ekonomi-bansos-untuk-karyawan-akan-menciptakan-trickle-down-effect> diakses pada 12 November 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang istilah “Birokrasi”  
<https://kbbi.web.id/birokratis>, diakses pada 12 November 2020

Keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta No. 68/ Kep/2015 Tentang  
Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa  
Yogyakarta. <https://jdihn.go.id/files/398/1470099660skgub68-2015.pdf>.  
Diakses pada 31 Oktober 2020.

Lingkar LSM, “Mengakhiri Konflik LSM dan Pemerintah,”  
<http://lingkarlsm.com/mengakhiri-konflik-lsm-dan-pemerintah/> diakses  
pada 16 Oktober 2020.

MAP “Kontroversi Amdal Pembangunan Bandara NYIA di Kulonprogo.”  
<https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/kontroversi-amdal-pemaksanaan-pembangunan-bandara-nyia-di-kulonprogo/> diakses pada 15 November  
2020.

Media Sosial Facebook LSPPA [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid.](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid.)  
Diakses Pada 12 Oktober 2020.

Pemerintah DIY Tahun 2016. “Rencana Kerja Pembangunan Daerah Yogyakarta.  
Yogyakarta: Pemrov DIY Tahun 2016.”  
[https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd\\_dan\\_rkpd\\_provinsi/DI%20Yogyakarta/RKPD%20DI%20Yogyakarta%202016.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/DI%20Yogyakarta/RKPD%20DI%20Yogyakarta%202016.pdf) diakses pada 12  
Oktober 2020.

Profil LSPPA, <http://lsppa.or.id/profil-lsppa/>, Website LSPPA ini diakses oleh  
penulis pada 19 Februari 2017, untuk saat ini Website sudah tidak dapat  
diakses karena media sosial LSPPA yang aktif saat ini yaitu hanya  
Facebook <https://web.facebook.com/lsppa.fanpage.>

Rayakonsult Jateng yang berjudul “Pantauan Udara Proyek Jalur KA Bandara  
YIA November 2020.”  
<https://www.youtube.com/watch?v=Nq3JLeIE5EY> diakses pada 22  
November 2020.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Taufiqur Rohman  
Tempat tanggal lahir : Gresik, 21 Februari 1995  
Alamat tinggal : Nayan RT.03 RW.25 No. 111, Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman.  
Alamat E-mail : [ahmadtaufiq102@gmail.com](mailto:ahmadtaufiq102@gmail.com)  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Telepon : 081363317533

### DATA PENDIDIKAN

SD	: MI Darul Hikmah Kedungrukem	2001 - 2006
SMP	: SMP Ma'arif Gempol	2007 - 2009
SMA	: SMA NU 03 Gresik	2010- 2012
S1	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013 – 2017

### PENGABDIAN

Praktik Pengembangan Masyarakat di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015.

Praktik Pengembangan Masyarakat di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) pada tahun 2016.

### PENGALAMAN BERORGANISASI

Pendampingan Anak yatim di organisasi Delapan Kama sejak tahun 2014 sampai sekarang.

### KAJIAN ILMIAH DAN PUBLIKASI

STRATEGI DAKWAH POPULER HANAN ATTAKI TENTANG CINTA DAN ISLAMISME  
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2018. JURNAL AL MISHBAH, Dalam:  
<https://doi.org/10.24239/al-mishbah.vol14.iss2.115>